

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Perbedaan informasi keuangan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen (*agent*) atau yang dikenal dengan asimetri informasi (Leonard & Paul dalam Rozania, 2016:3482) dimana pemilik beranggapan bahwa pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan yang dikelolanya, sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan yang di buat manajemen, maka laporan keuangan diaudit oleh pihak eksternal, yaitu auditor.

Laporan keuangan yang dilakukan pemeriksaan (audit) bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara benar dan wajar. Audit atas laporan keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian dan dunia bisnis. Informasi yang andal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai pengambilan keputusan ekonomi kedepan. Informasi akan lebih dipercaya dan akuntabel apabila informasi tersebut telah dilakukan audit oleh pihak independen yaitu dalam bentuk opini atas laporan keuangan. Audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak

dipengaruhi oleh salah saji (*misstatement*) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan yang terbebas dari kekeliruan maupun kecurangan (Tuanakotta, 2015: 06).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran dalam penugasan auditnya. Kemampuan ini didukung oleh kemampuan auditor untuk memahami dan mengerti kecurangan, jenis, karakteristik dan cara mendeteksinya. Setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan disebabkan beberapa faktor misalnya tingkat beban kerja dan tekanan waktu, tingkat pengalaman yang berbeda dan sebagainya (Dandi, 2017: 912).

Beban kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Lopez dan Peters (dalam Fitriany dan Nasution, 2012) menyatakan bahwa ketika berada pada *Busy Season*, yaitu pada periode kuartal pertama awal tahun, auditor diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus pemeriksaan yang membuat auditor kelelahan dan menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tekanan beban kerja yang berat bagi auditor akan berdampak negatif bagi proses audit, antara lain auditor akan cenderung mengurangi beberapa prosedur audit dan auditor akan dengan mudah menerima penjelasan yang diberikan oleh klien. Hasil penelitian Fitriany dan Nasution (2012) menunjukkan bahwa beban kerja berdampak negatif dalam mendeteksi kecurangan, hal ini berarti semakin banyak beban kerja yang dimiliki oleh auditor maka semakin rendah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Novita (2015), Faradina (2016), Dandi (2017) yang menunjukkan bahwa beban kerja tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan

Selain beban kerja, faktor yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan. Semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam menemukan adanya kecurangan. Auditor yang berpengalaman lebih banyak akan memiliki selektifitas yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017), Nasution & Fitriany (2012), Biksa & Wiratmaja (2016) yang menyatakan pengalaman memiliki pengaruh dalam mendeteksi kecurangan. Kushasyandaita (dalam Emawan, Sinarwati & Herawati, 2014) menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait pemberian opini atas laporan auditnya serta dapat menjadi faktor dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Ketika menjalankan penugasan audit di lapangan, seorang auditor akan dihadapkan pada situasi dimana mereka harus bersikap independen. Auditor harus mempertahankan sikap independen terhadap klien sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik. Sikap independensi menunjukkan keputusan auditor tidak akan memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, begitu pula apabila auditor menemukan adanya tindak kecurangan dalam proses pengauditan.

Pengaruh sikap independensi dalam mendeteksi kecurangan pada penelitian yang dilakukan oleh Biksa & Wiratmaja (2016) menunjukkan bahwa sikap independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyani, Atmadja, & Herawati (2014), Hartan (2016), Idawati & Gunawan (2015), dan Putra (2017) yang menunjukkan bahwa independensi mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

Tanggung jawab auditor dalam kepentingan publik, bukan hanya mengharuskan auditor untuk menerapkan sikap independensi dalam menjalankan tugas auditnya, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Seorang yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pernyataan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan tindakan kecurangan.

Adnyani, Atmadja, & Herawati (2014) menyimpulkan bahwa skeptisme profesional secara signifikan berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut didukung oleh Biksa & Wiratmaja (2016), Nasution (2012), Putra (2017), Pramana, Irianto, & Nurkholis (2016), dan Hartan (2016) yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini berarti tinggi rendahnya skeptisme

profesional yang dimiliki seorang auditor menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Suryanto, Indriyani, & Sofyani (2017) menunjukkan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit dalam mendeteksi kecurangan yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Di Indonesia, salah satu kasus kecurangan yaitu melibatkan PT Kimia Farma (KF), perusahaan obat-obatan milik pemerintah ini pada audit per 31 Desember 2001, manajemen KF melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp132 Milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustoffa (HTM). Akan tetapi, kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, pada 03 Oktober 2002 laporan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali (*restated*), karena ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan disajikan sebesar Rp99,56 Milyar, lebih rendah Rp32,6 Milyar (24,7%) dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp2,7 Milyar, pada unit logistic sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp23,9 Milyar, pada unit pedagang besar farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp8,1 Milyar dan *overstated* penjualan sebesar Rp10,7 Milyar (Syahrul, 2003)

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma,

melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan pada tanggal 01 dan 03 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi KF per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor, sehingga tidak berhasil terdeteksi (Syahrul, 2003)

Berdasarkan penyelidikan BAPEPAM, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT KF telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Sehubungan dengan temuan tersebut, PT KF dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 juta. Sedangkan Direksi lama PT KF diwajibkan untuk membayar sejumlah Rp1 Milyar, dan Sdr. Ludovicus Sensi W, rekan KAP HTM selaku auditor PT Kima Farma diwajibkan membayar sejumlah Rp100 Juta untuk disetor ke Kas Negara yang dianggap telah gagal dalam menerapkan SPAP SA Seksi 110 paragraf 04, tentang persyaratan profesional, yaitu auditor dituntut memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen (Syahrul, 2003)

Contoh lain datang dari perusahaan raksasa Inggris, British Telecom mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Berdasarkan salah satu berita online, *fraud* yang terjadi di British telecom berdampak kepada Kantor akuntan publiknya, PWC (*Price Waterhouse Coopers*) salah satu kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *Big four*. Tentu saja dampak *fraud* akuntansi bukan hanya menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tercemar,

namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal ekstensi akuntansi publik sangat bergantung pada kepercayaan publik pada reputasi profesional akuntan public (Priantara, 2017)

Hal yang mengejutkan dalam kasus ini adalah relasi PWC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun. *Fraud* akuntansi ini gagal dideteksi oleh PWC, justru *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*). Atas kegagalan PWC dalam mendeteksi *fraud* ini, *Board of Director British* tidak puas dan segera mengganti PWC dengan KPMG untuk melakukan akuntansi investigasi. *Fraud* akuntansi yang dilakukan British Telecom relatif sederhana, yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dengan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor* (Priantara, 2017)

Penegak hukum Italia melakukan proses investigasi terhadap tiga orang mantan eksekutif dan dua staff British Telecom di Italia. Tuduhan *fraud* dialamatkan kepada Gianluca Cimini, mantan CEO British Telecom yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan vendor dan kontraknya, serta perilaku yang mengintimidasi bawahan. Mantan *Chief Operation Officer*, Stefania Truzzoli dituduh memanipulasi hasil operasional yang dipakai menjadi dasar pemberian bonus dan manipulasi informasi hasil kinerja ke korporasi induk (British Telecom Europe). Mantan *Chief Financial Officer*, Luca Sebastiani menerima tuduhan karena tidak

mampu melaporkan *fraud* keuangan dan mendorong pegawainya, Giacimi Ingannamorte membuat invoice palsu. Luca Torrigiani, staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya dituduh melanggar aturan dengan memilih vendor dan menerima pembayaran dari agen British Telecom Italia. SFO (*Serious Fraud Office*), selaku lembaga antifraud di Inggris mengenakan denda sebesar GBP129 juta kepada masing-masing mantan eksekutif British Telecom atas tuduhan ini (Priantara, 2017)

Dampak *fraud* ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan laba sebesar GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas sebesar GBP500 juta di tahun 2017 untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Harga saham anjlok seperlima ketika mengumumkan koreksi pendapatannya di bulan Januari 2017. Luis Alvarez, selaku eksekutif yang membawahi British Telecom Italia pun angkat kaki. Gavin Patteson, selaku *Chief Executive Officer* dan Tony Chanmugam, selaku *Chief Financial Officer* dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing GBP340.000 dan GBP193.000. beberapa pemegang saham segera mengajukan tuntutan kerugian kepada korporasi karena dianggap telah mengelabui investor dan tidak segera mengumumkan *fraud* keuangan tersebut (Priantara, 2017)

Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa auditor memiliki peran dalam terjadinya kecurangan, bahkan sejak tahun 2004 sampai 2009, terjadi sebanyak 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik. Berikut ini adalah data yang terkait dengan pelanggaran akuntan publik.

Tabel 1.1
Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik

Aspek Yang Dilanggar	Jumlah Kasus Pelanggaran Berdasarkan Tahun						Total Kasus
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Karakteristik Personal Akuntan				2	1	2	5
Pengalaman Audit	1			2	2	1	6
Independensi Akuntan Publik	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan Etika Akuntan Publik	2	1		1	5	3	12
Kualitas Audit	2	1	2	5	8	4	22
Total	6	3	3	11	17	12	52

Sumber: Agoes (2012)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap pengalaman audit dan independensi auditor, dengan jumlah pelanggaran terhadap pengalaman audit adalah 6 (enam) pelanggaran dari tahun 2004 sampai dengan 2009, dimana jumlah ini menunjukan bahwa terdapat 1 (satu) pelanggaran terhadap pengalaman auditor di tahun 2004, namun dari tahun 2005 sampai dengan 2006 tidak menunjukan adanya pelanggaran terhadap pengalaman auditor, di tahun selanjutnya (2006-2007) menunjukan peningkatan dengan 2 (dua) pelanggaran pada masing-masing tahunnya, dan di tahun 2009 menunjukan penurunan yaitu terdapat 1 (satu) pelanggaran terhadap pengalaman audit.. Sedangkan jumlah pelanggaran terhadap independensi auditor dari tahun 2004 sampai dengan 2009 adalah 7 (pelanggaran), dimana pada tahun 2004 sampai 2008 tidak menunjukan peningkatan yaitu 1 (satu) pelanggaran pada masing-

masing tahunnya, dan peningkatan yang tidak signifikan di tahun 2009 dengan 2 (dua) pelanggaran terhadap independensi auditor. Pengalaman dan independensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, Hal ini dibuktikan oleh penelitian Biksa dan Wiratmaja (2016) dan Putra (2017) pengalaman dan independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, yang berarti semakin banyak pengalaman dan penerapan independensi yang baik akan meningkatkan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Namun, pelanggaran terhadap pengalaman dan independensi menunjukkan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia tak hanya terjadi dalam perusahaan kecil, perusahaan terbuka seperti Kimia Farma, perusahaan perbankan, bahkan terjadi pada perusahaan pertelekomunikasian. Pada awal tahun 2017 lalu, mencuat kembali kasus yang dapat dikaitkan dengan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) terkemuka, bahkan terdaftar sebagai KAP Big 4 di dunia dengan perusahaan telekomunikasi terbesar ke-3 di Indonesia. Kasus yang menyeret nama besar Ernst & Young's (EY) Indonesia yakni Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja terjadi saat KAP ini mengaudit PT Indosat Tbk pada tahun tutup buku 2011 lalu (Malik, 2017)

Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal

melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017 (Malik, 2017)

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. “Dalam ketergesaan mereka atas mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi. Manajemen EY dalam pernyataan tertulisnya menyatakan telah memperkuat proses pengawasan internal sejak isu ini mencuat. “Sejak kasus ini mengemuka, kami terus melanjutkan penguatan kebijakan dan pemeriksaan audit global kami,” ungkap Manajemen EY dalam pernyataannya (Malik, 2017)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dengan ini peneliti mengajukan judul **“Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Auditor yang bekerja di KAP Wilayah Jakarta Pusat)”** sebagai penelitiannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut

1. Apakah Beban kerja berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
4. Apakah Skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja seorang auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman seorang auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi seorang auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

4. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional seorang auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperluas pengetahuan tentang teori keagenan yang berhubungan dengan pengaruh beban kerja, pengalaman, independensi, dan skeptisme profesional dalam mendeteksi kecurangan.
- b. Memperoleh bukti-bukti terkait teori keagenan mengenai beban kerja, pengalaman, independensi, dan skeptisme profesional dalam mendeteksi kecurangan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk lebih memahami dan mendalami pentingnya tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan faktor-faktor yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memantau para auditor agar terus meningkatkan sikap independensi dan skeptisme profesional auditor dalam nama lembaga Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan dan pikiran mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan faktor-faktornya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan menjadi bekal bagi peneliti kelak saat terjun langsung ke dunia kerja khususnya pada bidang kerja audit.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pendeteksian kecurangan.